

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi sebagai sebuah proses peningkatan *output* dari waktu ke waktu menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan suatu Negara (Todaro & Smith, 2004). Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan di suatu perekonomian. Kesejahteraan dan kemajuan suatu perekonomian ditentukan oleh besarnya pertumbuhan yang ditunjukkan oleh perubahan *output* nasional (Sukirno, 2005). Pertumbuhan ekonomi menyangkut proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Pertumbuhan menyangkut perkembangan yang berdimensi tunggal dan diukur dengan meningkatnya hasil produksi dan pendapatan. Dalam hal ini terdapat kenaikan dalam pendapatan nasional yang ditunjukkan oleh besarnya nilai Produk Domestik Bruto (Hadi, 2005).

Indonesia sebagai suatu negara yang sedang berkembang sedang giat melaksanakan pembangunan secara berencana serta bertahap, tanpa mengabaikan usaha pemerataan dan kestabilan. Pembangunan nasional mengusahakan tercapainya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, yang pada akhirnya memungkinkan terwujudnya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh masyarakat. Adapun gambar grafik pertumbuhan ekonomi Indonesia dari tahun 2016-2021 di bawah ini terus mengalami fluktuasi. Fluktuasi pertumbuhan ekonomi tertinggi Indonesia terjadi pada tahun 2018 sebesar 5,17% dan yang paling rendah pada tahun 2020 sebesar -2.07%. Rendahnya pertumbuhan ekonomi

pada tahun 2020 disebabkan kondisi perekonomian global yang masih mengalami tekanan akibat pandemi covid-19. Sehingga perekonomian secara global mengalami tekanan dan lumpuh. Berikut gambar tabel laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia tahun 2016-2021.

Gambar 1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia tahun 2016 – 2021



Sumber : BPS Nasional 2016-2021

Gambar 1.1 tentang laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia mengalami fluktuatif. Dapat diketahui dari tahun ke tahun mengalami penurunan dan kenaikan hingga pada tahun 2020 pertumbuhan Indonesia mengalami penurunan sampai angka negatif yaitu sebesar -2,07%. Penyebab terjadinya penurunan tersebut diakibatkan lumpuhnya perekonomian Indonesia, yang tidak lain besar kemungkinan disebabkan karena terjadinya wabah penyakit Covid 19.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu aspek terpenting di suatu negara. Setiap negara pasti ingin perekonomian di negaranya selalu tumbuh. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu tanda bahwa kondisi perekonomian suatu negara tersebut sedang menuju keadaan yang baik. Untuk menilai kondisi

perekonomian sebuah negara, diperlukan indikator ekonomi seperti, *Gross Domestic Product* (GDP) atau PDRB. Kemakmuran suatu negara dapat dilihat dari pendapatan nasional di setiap negara. Pendapatan nasional tersebut berasal dari rata-rata pendapatan tiap penduduk suatu negara. Apabila indikator ekonomi tersebut baik maka kemakmuran negara tersebut juga baik, dan sebaliknya.

Penyelidikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia yang melambat disebabkan oleh beberapa faktormempengaruhi dalam kerangka teori pertumbuhan ekonomi neo klasik dan teori pertumbuhan endogen(Chirwa & Odhiambo, 2016).

Berbicara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) salah satu topik yang tentu dibahas sudah tentu perihal dana perimbangan. Dana perimbangan adalah dana yang ada kaitannya dengan dana yang dialirkan dari APBN untukkebutuhan daerah otonom. Dana perimbangan ininantinya akan dialirkan pada daerah otonom. Tujuan pemberian dana perimbangan adalah agar daerah bisa mencukupi kebutuhan aktivitas dan program desentralisasi di sana. Untuk besaran dana perimbangan sendiri akan diatur di setiap tahun anggaran. Dana yang satu ini dialokasikan berdasarkan jenisnya. Jenis-jenis dana perimbangan sendiri dibagi menjadi tiga jenis : Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Salah satu faktornya desentralisasi fiskal. Pada dasarnya desentralisasi akan menciptakan efisiensi ekonomi dan memiliki pengaruh pembentukan dinamis pada pertumbuhan ekonomi(Oates, 1993). Desentralisasi di bidang penerimaan akan menstimulasi mobilisasi penerimaan dari sumber-sumber keuangan

daerah(Shah, 1994). Hasil ini mendukung hal yang fundamental bahwa pengaruh dari desentralisasi sangat tergantung pada institusi fiskal dan sistem politik yang ada di negara tersebut.

Desentralisasi Fiskal sebagai implementasi dari kebijakan otonomi daerah dapat menjadi ukuran kemandirian keuangan di daerah (Salma Nazikha & Rahmawati, 2021). Desentralisasi fiskal adalah pembagian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam mengambil keputusan fiskal. Melalui desentralisasi fiskal dapat dilihat pembangunan ekonomi lokal sudah berjalan baik atau belum berjalan baik.

Desentralisasi fiskal dapat dilakukan dari sisi pengeluaran maupun penerimaan. Desentralisasi fiskal sisi penerimaan lebih ke arah untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola pendapatan daerahnya sendiri, biasanya yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah. Pelaksanaan desentralisasi fiskal sisi penerimaan ini tidak mudah dilaksanakan karena bervariasi sumber-sumber penerimaan asli daerah. Umumnya, pemerintah yang berada di perkotaan memiliki potensi ekonomi yang lebih besar sebagai sumber pendapatan daerahnya, terutama bila dilihat dari jenis-jenis pajak daerah yang umumnya memiliki basis pajak perkotaan, sedangkan untuk pemerintah daerah nonperkotaan perlu melakukan upaya untuk menumbuhkan basis pajaknya yang didasarkan atas masing-masing potensi sumber dayanya (Mahi & Supriyanti, 2019).

Dalam pembangunan ekonomi, modal menjadi peranan penting. Menurut teori

Adam Smith ini, di akumulasikan modal akan menentukan cepat atau lambatnya pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Modal tersebut diperoleh dari tabungan yang dilakukan masyarakat. Dengan mengakumulasikan modal yang dihasilkan dari tabungan, maka pelaku ekonomi dapat menginvestasikannya ke sektor riil, dalam upaya untuk meningkatkan penerimaannya.

Sebagian besar ekonom percaya bahwa desentralisasi fiskal dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, memperbaiki pemerataan, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat dan sebagian lain berpandangan sebaliknya (Saputra & Mahmudi, 2012). Penelitian Amagoh & Ajab Amin (2012) menyatakan bahwa desentralisasi fiskal yang efektif dipengaruhi oleh kerangka kelembagaan yang bersifat komprehensif sehingga kebijakan desentralisasi fiskal menghasilkan manfaat tambahan bagi akuntabilitas, pendapatan, dan otonomi politik serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa dalam literatur teoritis lebih condong mendukung hubungan positif antara desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi. Oates (1993), Bird (1993) dan Bahl, R. W. & Linh (1992) menyatakan bahwa dengan adanya kewenangan desentralisasi fiskal diharapkan layanan kepada masyarakat akan semakin efisien dan ujungnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Teori *Fiscal Federalism* merupakan teori yang dikembangkan oleh Hayek (1945), Musgrave (1959), dan Oates (1972). Teori ini menjelaskan tentang hubungan antara desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi. Teori ini memperjelas bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dicapai dengan jalan

desentralisasi fiskal yakni adanya pelimpahan kewenangan fiskal oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatur rumah tangga pemerintahan daerahnya sendiri. Diberikannya kewenangan di setiap daerah maka setiap pemerintah daerah akan lebih dekat dengan masyarakat sehingga mengetahui potensi bahkan kondisi daerah masing-masing. Selain itu, pemerintah daerah mempunyai kewenangan membuat peraturan tentang ekonomi daerahnya. Lama-kelamaan dapat mencapai kualitas serta efisiensi pelayanan publik. Dan pada akhirnya akan tercapainya peningkatan pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah otonom.

Kemudian dalam penelitian Zhang, T., & Zou (2001) juga menunjukkan bahwa desentralisasi memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di India. Oates (1993) berpendapat bahwa desentralisasi dipandang sebagai suatu langkah untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan, mengurangi defisit anggaran dan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi.

Menurut Sidik (2002) sebagai pendorong diberlakukannya desentralisasi fiskal berjalan dengan baik jika unsur ini terpenuhi, yaitu 1) pemerintah pusat insentif melakukan pengawasan dan *enforcement*. 2) terdapat keseimbangan antara akuntabilitas dan kewenangan, terlebih dalam konteks pemungutan pajak dan retribusi daerah. 3) menuju kondusifitas dalam politik. 4) dalam proses pengambilan sebuah keputusan di daerah harus demokratis, dimana pengambilan keputusan tentang manfaat dan biaya transparan serta pihak lain terkait masuk kedalam pengambilan keputusan tersebut. 5) keputusan dari kebijakan yang diambil bersama masyarakat sepenuhnya merupakan tanggung jawab dengan

mendapatkan dukungan instansi dan kapasitas manajerial yang sesuai diinginkan oleh pemerintah daerah. 6) kualitas sumber daya manusia yang kapabel dalam menggantikan peran sebelumnya merupakan pemerintah pusat. Kemudian dalam pelimpahan kewenangan yang dilimpahkan oleh pemerintah membawa konsekuensi pada anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan tersebut, semakin banyak kewenangan yang dilimpahkan maka kecenderungan semakin besar biaya yang dibutuhkan.

Tabel.1.1 Realisasi Penerimaan Dana Perimbangan Seluruh Provinsi di Indonesia (Rupiah)

Tahun	DAU	DAK	DBH	Total Dana Perimbangan
2019	58.691.805.994	66.244.328.451	34.326.791.971	159.262.926.416
2020	53.313.673.855	67.973.780.481	36.217.448.355	157.504.902.691
2021	60.669.496.563	74.738.449.422	32.443.354.278	167.851.300.263

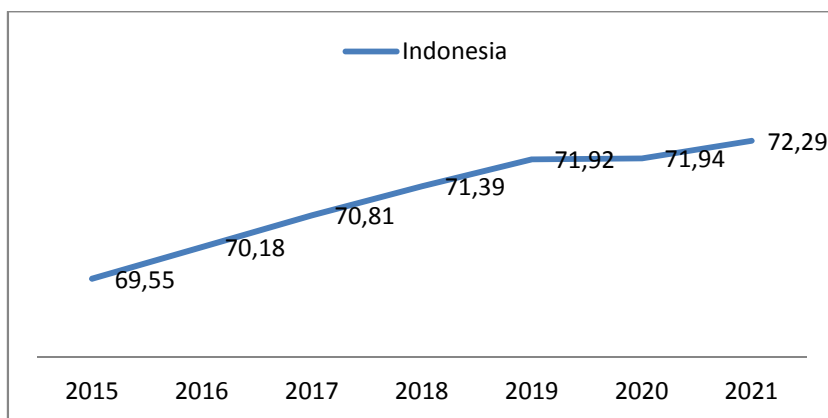
Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia (diolah)

Dari data tabel di atas dapat kita lihat bahwa terjadi kenaikan secara berkelanjutan terhadap jumlah yang dialokasikan ke daerah baik bagi semua jenis dana perimbangan yang mana Dana Alokasi Khusus memiliki peran yang besar karena nilai yang diberikan sangat tinggi. Kemudian Dana Alokasi Umum merupakan dana yang terkecil di antara kedua dana tersebut. Besarnya kedua peran DAK dan DBH menjadi bukti di mana masa desentralisasi ini pemerintah daerah mendapatkan kepercayaan pemerintah pusat dalam rangka penggunaan dana menunjukkan bahwa penggunaan kedua jenis dana tersebut sama sekali tidak ada campur tangan pemerintah pusat.

Selain desentralisasi fiskal yang mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi negara yang menganut sistem demokrasi, ada faktor lain di antaranya

human capital (Fetahi-Vehapi et al., 2015; Freire-Serén, 2002). Tolak ukur dari peningkatan kualitas hidup manusia dibutuhkan barometer perhitungan sosial yang mencakup tiga dimensi yang diantaranya: Kesehatan, pendidikan, dan standart hidup layak(Muqorrobin & Soejoto, 2017). Melalui kesehatan, pendidikan dan standart hidup layak diharapkan akan terjadi peningkatan kualitas hidup manusia. Pada saat ini untuk menghitung keberhasilan kualitas hidup manusia bukan lagi dapat dilihat dari tingkat pendapatannya, melainkan dari keberhasilan pembangunan yang tidak luput dari peran pemerintah itu sendiri. Untuk lebih jelasnya, berikut Indeks Pembangunan Manusia tahun 2015-2021 di bawah ini.

Grafik 1.4 Indeks Pembangunan Manusia tahun 2015-2021



Sumber : Badan Pusat Statistik Nasional, 2021

Berdasarkan pada gambar grafik disebutkan rata-rata Indek Pembangunan Manusia Nasional dari tahun tahun ke tahun sejak tahun 2015-2021 dalam kondisi terlihat stabil naik, walaupun hal kenaikan tersebut terlihat signifikan. Pada tahun 2015 ke tahun 2016 memiliki kenaikan sebesar 0,63. Kemudian pada tahun 2017 ke tahun 2018 memiliki kenaikan sebesar 0,58. Selanjutnya pada tahun 2019 ke tahun 2020 memiliki kenaikan sebesar 0,02 begitupun pada tahun 2020 ke tahun

2021 juga mengalami peningkatan. Namun, hal tersebut memiliki nilai kenaikan yang tidak begitu signifikan. Dalam teori pertumbuhan ekonomi neo klasik atau yang dikenal dengan teori pertumbuhan ekonomi eksogen menekankan pada titik tumbuh kualitas sumber daya manusia sebagai akumulasi modal fisik dan penggerak kemajuan pengetahuan teknologi (Solow, 1956).

Determinasi pertumbuhan ekonomi yang kurang mendapatkan perhatian penelitian terdahulu, yakni hubungan UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi. Indonesia yang termasuk ekonomi berkembang, peran UMKM mengalami dampak negatif ataupun netral terhadap pertumbuhan ekonomi; sebaliknya peran UMKM di negara maju sangat berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonominya (Wennekers & Thurik, 1999). Pengaruh UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi menurut penelitian (Resalawati, 2011) pada tahun 2000-2009 menunjukkan pengaruh yang positif signifikan artinya meningkatnya pertumbuhan ekonomi sejalan dengan meningkatnya jumlah UMKM.

Kegiatan usaha mikro atau UMKM merupakan salah satu bidang usaha yang dapat berkembang dan konsisten dalam perekonomian nasional. UMKM menjadi wadah yang baik bagi penciptaan lapangan pekerjaan yang direncanakan baik oleh pemerintah, swasta dan pelakunya usaha perorangan. Penekanan pada pengembangan potensi UMKM membawa pembahasan penelitian ini menuju konsep pengembangan ekonomi lokal yang kreatif melalui proses kewirausahaan yang dinamis, serta kesejahteraan komunitas dan usaha dalam rangka meningkatkan kualitas hidup bagi semua yang berada dalam komunitas yang

terlibat langsung dalam pendirian usaha mikro UMKM. Nilai ekonomi dari suatu produk atau jasa pada sektor UMKM tidak lagi ditentukan oleh bahan baku atau system produksi seperti pada era industri, tetapi lebih kepada pemanfaatan kreativitas dan penciptaan inovasi melalui perkembangan teknologi informasi yang semakin maju. Industri tidak dapat lagi bersaing di pasar global dengan hanya mengandalkan harga atau kualitas produk saja, tetapi harus bersaing berbasiskan inovasi, kreativitas dan imajinasi.

Hal yang paling sering terungkap adalah keterbatasan modal fisik (finansial, struktur, dan infrastruktur) dan kesulitan dalam pemasaran, kesulitan dalam pemasaran dapat dilihat sebagai salah satu akibat dari rendahnya kualitas pekerja dan pengusaha serta keterbatasan teknologi yang membuat produk-produk UMKM belum memiliki kualitas dan harga yang kompetitif yang mampu bersaing secara cakupan wilayah di kancah nasional hingga internasional.

Berdasarkan hal tersebut, pada penelitian ini akan dikaji pengaruh desentralisasi fiskal, IPM dan UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi yang merupakan penggabungan dua isu yaitu ekonomi dan sosial, dimana untuk kasus dua hubungan ekonomi dan sosial menarik sampel di 33 Provinsi Indonesia, dengan menggunakan data sekunder dari Pusat Statistik Indonesia periode 2015 sampai dengan 2021. Kendatipun apakah sudah tepatkah proses desentralisasi fiskal di Indonesia? Kini timbul harapan besar bahwa desentralisasi fiskal, IPM dan UMKM di Indonesia akan memberi manfaat seperti peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan determinasi pertumbuhan ekonomi di Indonesia sebagai negara berkembang, peneliti mengangkat judul tentang “**Pengaruh Desentralisasi Fiskal, IPM, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan tentang apa yang dikemukakan dalam latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanapengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap Desentralisasi Fiskal, IPM, UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh IPM terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia.
3. Untuk mengetahui pengaruh UMKM terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

2.1.1 Pengambil kebijakan

Bagi pengambil kebijakan, hadirnya penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi mengenai pengaruh Desentralisasi Fiskal, IPM,

UMKM terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. Sehingga dapat memahami lebih jauh untuk pengambilan keputusan oleh Stakeholder terkait.

2.1.2 Ilmu pengetahuan

Diharapkan penelitian ini dapat menambah khasanah ilmu ekonomi khususnya ekonomi pembangunan, serta dapat melengkapi kajian untuk mengungkap secara empiris sejauh apa pengaruh Desentralisasi fiskal, IPM, UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.